

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu persoalan mendasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, adalah bagaimana membangun mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan dana otonomi khusus kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Ada tiga poin penting yang sangat ditekankan pada dana otonomi khusus itu, diantaranya adalah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ditambah lagi ada satu penambahan dana otonomi khusus yaitu dibidang infrastruktur yang disebut Dana Tambahan Infrastruktur (DTI).

Provinsi Papua dan Papua Barat adalah daerah yang penuh dengan paradoks. Secara umum dua Provinsi ini dikenal memiliki potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah bahkan merupakan daerah terkaya di Indonesia terutama disektor pertambangan. Berbanding terbalik dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di dua Provinsi ini. Sumber Daya Alam yang melimpah ternyata belum mampu mensejahterakan masyarakat Asli Papua, baik itu di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik, maupun Sosial. Hal ini seperti yang dikatakan oleh (Darimus, 2006), bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dinas

Pendidikan memiliki peran sangat penting sebagai lembaga yang diberi wewenang khusus mengelola pendidikan, maka sumber daya manusia pada instansi ini pun harus mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, dengan mengelola pendidikan secara mandiri, baik dibidang manajemen, organisasi, kurikulum, sarana prasarana, biaya, hubungan masyarakat, lingkungan internal maupun eksternal, sebagai bagian dari wujud peningkatan kualitas SDM itu sendiri.

Sudah hampir lebih sembilan belas (19) tahun Otonomi khusus diberlakukan di tanah Papua. Semenjak 2001 sampai 2019 masyarakat Papua masih menikmati otonomi khusus. Hanya ada 5 daerah yang mendapatkan gelar khusus yakni, Nangro Aceh Darusalam, Daerah khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu merupakan sebuah kehormatan bagi daerah-daerah ini bahwasanya tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan ke khususan yang sama. Papua merupakan salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di Indonesia. Entah kenapa sampai saat ini masih banyak masyarakat asli papua yang hidupnya di bawah garis kemiskinan sekitar 914,87 ribu jiwa (28,4%) dari total jumlah penduduk Papua 3.486 juta jiwa (BPS 2017). Pada tahun 2002 oleh pemerintah pusat dibuat sebuah kebijakan bahwa Provinsi Papua harus diberikan otoritas untuk mengelolah urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Keputusan ini dituang dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, kemudian dari UU No. 21 Tahun 2001 dibuat lagi sebuah kebijakan yang dikembangkan mengenai perluasan Otonomi Khusus yang awalnya hanya untuk provinsi Papua dibagi menjadi dua Provinsi untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Semenjak tahun 2001 dana Otonomi Khusus diluncurkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dan tahun 2008 untuk Papua Barat. Dari data BPS setiap tahun semenjak 2001 dana Otonomi Khusus untuk Papua terus meningkat, semenjak 2001 setiap tahun dana otsus untuk papua sejumlah 6.000.000.000, triliun dengan pembagian 4 triliun untuk Provinsi Papua dan 2.000.000.000, triliun untuk Provinsi Papua Barat. Dari dana tersebut 30% (tiga puluh persen), diperuntukkan untuk pendidikan, jika kita hitung dari besaran dana 30% (tiga puluh persen) itu, maka tidak mungkin jika masyarakat Papua secara pendidikan masih sangat terbelakang, sebab peluncuran dana yang begitu besar untuk pendidikan ternyata belum mampu meningkatkan sumber daya manusia orang asli papua khususnya dibidang pendidikan. “Pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran bantuan terhadap pendidikan, dimana dikebanyakan daerah masih sangat minim terkait implementasi anggaran pendidikan, padahal alokasi anggar sudah dianggarkan, namun sering terjadi tumpang tindih di lapangan terkait penyaluran bantuan kepada sekolah-sekolah, karena masih banyak sumber daya pengelola kita yang belum bekerja secara optimal”, (Ningsih, 2019).

Orang Asli Papua merupakan warga negara Indonesia yang juga ingin dihargai sama seperti masyarakat pada umumnya, sehingga kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi penduduk orang asli papua merupakan salah satu cara untuk menghormati dan menghargai hak-hak mereka sebagai masyarakat asli Papua. Peran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat signifikan, masyarakat dapat memberikan saran terhadap kemajuan sekolah, agar pelaksanaan pendidikan dapat terlaksana dengan

baik”. (Desi Eri Kusumaningrum et al., 2017). Kalaulah dipenuhi bahwa Orang Asli Papua bisa mengeyang pendidikan dengan gratis, bukan tidak mungkin kualitas pendidikan di Papua bisa setara dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hanya saja dana yang begitu besar belum juga memberi harapan bagi orang asli papua untuk bisa segera menikmati pendidikan secara berkualitas.

Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Bukankah kata Yudhoyono (2007), bahwa suatu negara dan bangsa akan maju apabila rakyatnya memiliki pendidikan yang tinggi dan berkualitas, sebaliknya suatu negara akan tertinggal dari negara dan bangsa lain apabila pendidikan rakyatnya rendah dan tidak berkualitas. “Membangun kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sebab pendidikan adalah salah satu bentuk investasi untuk sumber daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa di masa depan. (Rastra, 2016). Di Kota Sorong sendiri, secara pendidikan Orang Asli Papua masih sangat jauh dari harapan, entah disebabkan oleh faktor kebijakan atau karena memang pribadi Orang Asli Papua sendiri yang belum mampu. Padahal jika kita amati, kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari dana otonomi khusus Papua disediakan untuk pendidikan, kendati demikianpun kualitas pendidikan bagi masyarakat asli papua belum juga memenuhi standar yang diinginkan. Pada posisi ini sesungguhnya pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Masalah pendidikan di Papua maupun Papua Barat bukanlah hal yang baru kita dengar, dari data BPS Papua dan Papua Barat masih berada di urutan 31 dari 34 provinsi di Indonesia, ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua adalah bagian penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, suatu bangsa akan tertinggal dari bangsa lain dalam percaturan dan persaingan kehidupan global yang semakin kompetitif. Pendidikan yang baik pada hakekatnya adalah pendidikan yang berkualitas, sehingga cita-cita bangsa ini yang termaktub dalam pasal 31 undang-undang dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu pendidikan hendaknya dipandang dapat mengakomodir masyarakat agar suatu negara memiliki manusia-manusia yang berkualitas. Partisipasi masyarakat perlu dilibatkan dalam melaksanakan evaluasi program kerja, ini demi terwujudnya transparansi dalam kinerja pemerintah. (Mustaqim, 2016). Melalui pendidikan diupayakan dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kaya akan pengetahuan teoritis melainkan juga praktis, penguasaan teknologi, dan memiliki keahlian khusus. Hal ini juga yang menjadi visi pemerintah Kota Sorong yakni “Mewujudkan Kota Sorong Sebagai Kota Termaju di Tanah Papua”. Inilah yang kemudian menjadi dasar evaluasi dan peningkatan pendidikan di setiap negara secara berkesinambungan. Dengan demikian bagi pemerintah Kota Sorong untuk terus berupaya agar dapat merubah wajah pendidikan di tanah Papua Barat sehingga bisa terwujud Kota Sorong sebagai Kota termaju di tanah Papua.

Dari apa yang penulis uraikan mengenai kondisi Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua di Kota Sorong inilah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Orang Asli Papua Tahun 2016-2018.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah, “Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Orang Asli Papua Tahun 2016-2018?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan Proposal Tesis ini adalah:

- a.** Untuk mengetahui Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam meningkatkan Kualitas Pendidikan Orang Asli Papua Tahun 2016-2018
- b.** Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap pendidikan Orang Asli Papua.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara umum berfungsi sebagai filter dalam upaya memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis.

#### **a. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berfikir secara ilmiah dan memperluas wawasan bagi penulis khususnya dan bagi para

mahasiswa serta semua pihak pada umumnya, sehingga dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian serupa yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Orang Asli Papua Tahun 2016-2018.

**b. Secara Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang evaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Orang Asli Papua serta sebagai referensi untuk para mahasiswa di program magister ilmu pemerintahan dalam pengembangan ide untuk melakukan penelitian serupa.

**c. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah Kota Sorong pada khususnya, dan sebagai bekal ilmu pengetahuan secara kritis dan menambah wawasan berpikir kepada penulis yang diperoleh pada Program Pagsar Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan dan akan disumbangkan melalui penelitian ini kepada pemerintah sebagai aparat pelaksana lebih khusus Pemerintah Kota Sorong dalam membaca masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Orang Asli Papua Tahun 2016-2018.